



LAPORAN SEMESTER I

**BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**KUPANG
2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa patut kita panjatkan, atas terselesaikannya Laporan Semester I Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.

Melalui Laporan Semester I ini diharapkan dapat menjadi informasi mengenai pelaksanaan Program, Kegiatan dan Subkegiatan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sekaligus bahan evaluasi bagi peningkatan akuntabilitas kinerja pada masa akan datang. Peningkatan kinerja diperlukan agar Biro Organisasi dapat melaksanakan tugas dan fungsi secara optimal dalam merumuskan kebijakan daerah, penyiapan pengordinasian, pelaksanaan dan pencapaian target kinerja.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih terdapat kekurangan, sehingga sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan, laporan ini sangat terbuka terhadap saran dan masukan dalam rangka penyempurnaan dan perwujudan kinerja di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, tata laksana serta reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja.

Kupang, Juli 2025

Kepala Biro Organisasi
Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur



Djoese S.M. Nai Buti, S.Pt, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 197103291999031002

DAFTAR ISI

KATAPENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tugas dan Fungsi Biro Organisasi.....	1
1.3. Struktur Organisasi	2
1.4. Sistematika Penyajian.....	3
BAB II PERENCANAAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN.....	4
2.1. Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan.....	4
2.2. Perjanjian Kinerja Biro Organisasi Tahun 2025	6
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA SEMESTER I.....	10
3.1. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025	
Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan	
Bagian Tatalaksana.....	
Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas.....	
3.2. Realisasi Keuangan.....	25
3.3. Capaian Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja.....	26
BAB IV. PENUTUP	30

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 69 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, merupakan salah satu unsur staf penyusun Kebijakan Daerah dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelayanan administrasi umum di Bidang Organisasi yang bertugas membantu Gubernur dan menyusun kebijakan organisasi daerah dibidang administrasi umum.

Untuk merealisasi tugas dan fungsi tersebut, Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, selama tahun anggaran 2025 telah melaksanakan program, kegiatan dan subkegiatan dengan maksud agar dapat membantu dan mengawal tugas dan fungsi Biro Organisasi sehingga target kinerja dapat tercapai.

Sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2025, maka disusunlah Laporan Semester I Tahun 2025. Laporan Semester I ini merupakan pelaksanaan dari amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Melalui Laporan ini diharapkan menjadi informasi mengenai Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sekaligus bahan masukan bagi peningkatan akuntabilitas pada Semester II. Peningkatan akuntabilitas kinerja diperlukan agar Biro Organisasi dapat melaksanakan tugas dan fungsi secara maksimal dalam merumuskan kebijakan daerah, penyiapan pengordinasian, pelaksanaan dan pencapaian target kinerja.

1.2 Tugas dan Fungsi Biro Organisasi

Dalam melaksanakan tugas Biro Organisasi melaksanakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyiapan perumusan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, tata laksana serta reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja;
2. Penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, tata laksana serta reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja;
3. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, tata laksana serta reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja;
4. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, tata laksana serta reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten administrasi umum.

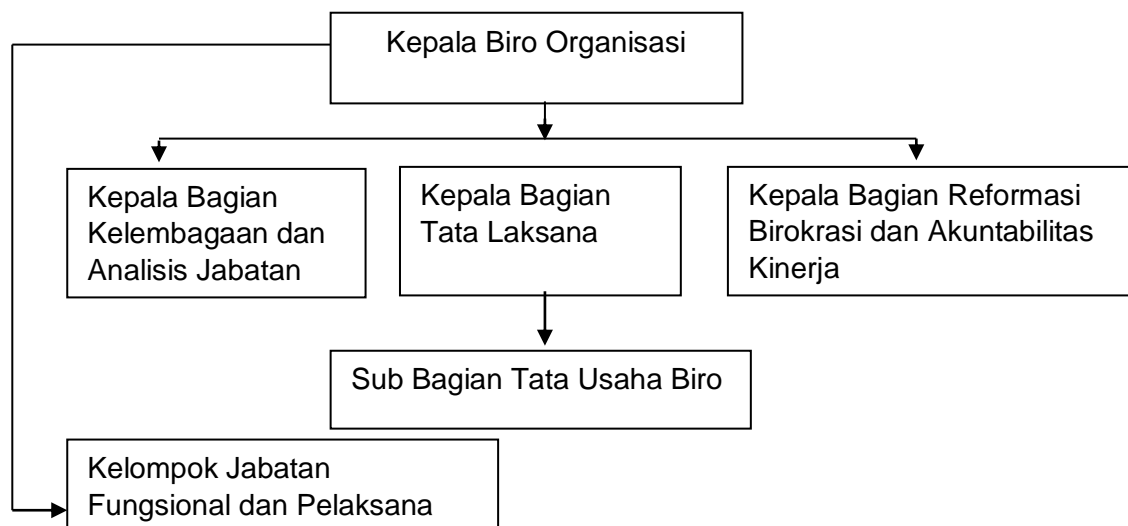
1.3 Struktur Organisasi

Struktur Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri atas :

1. Kepala Biro
2. Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan
3. Kepala Bagian Tata Laksana
 - Kepala Sub Bagian Tata Usaha
4. Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
5. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

Struktur Organisasi

Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur



1.4 Sistematika Penyajian

Laporan Semester I secara umum menginformasikan capaian pelaksanaan Program Kegiatan dan Subkegiatan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada semester I Tahun 2025. Membandingkan antara realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan dengan rencana kerja sebagai tolak ukur keberhasilan, dapat diperoleh masukan bagi perbaikan pelaksanaan program kegiatan dan subkegiatan.

Sistematika penyajian Laporan Semester I Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, tugas dan fungsi dan struktur organisasi serta sistematika penyajian
- Bab II Perencanaan Program, Kegiatan dan Subkegiatan tahun 2025
- Bab III Akuntabilitas Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Subkegiatan, menggambarkan rencana kerja tahun 2025 dan realisasi kegiatan semester I Tahun 2025.
- Bab IV Penutup, menjelaskan kesimpulan Laporan Semester I Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2025 dan menguraikan rencana tindaklanjut yang perlukan bagi perbaikan pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan di Semester II.

BAB II

PERENCANAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN

2.1 Rencana Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Subkegiatan dan Realisasi Anggaran Biro Organisasi

Pada Rencana Strategis Biro Organisasi Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026, sebagai pedoman bagi perangkat daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan prioritas dengan menggunakan sumber daya yang tersedia untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Rencana Strategis Biro Organisasi memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan dan sasaran pada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Rencana Kerja pada Tahun 2025 pada Biro Organisasi meliputi program sebagai berikut :

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Rp. 582.249.897,-
 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 214.769.697,-
 - 1.1 Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 18.343.000,-
 - 1.2 Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 27.315.700,-
 - 1.3 Subkegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 169.110.997,-
 2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 228.037.800,-
 - 2.1 Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan anggaran sebesar Rp. 40.183.300,-
 - 2.2 Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan anggaran sebesar Rp. 2.400.000,-
 - 2.3 Subkegiatan Penyediaan Bahan/Material dengan anggaran sebesar Rp. 40.451.500,-

- 2.4 Subkegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu dengan anggaran sebesar Rp. 35.964.000,-
- 2.5 Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 109.039.000,-
- 3. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan dengan anggaran sebesar Rp 34.200.000,-
 - 3.1 Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran sebesar Rp 34.200.000,-
- 4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 63.460.400,-
 - 4.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan anggaran sebesar Rp. 4.000.400,-
 - 4.2 Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran sebesar Rp. 3.780.000,-
 - 4.3 Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 55.680.000,-
- 5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 55.947.800,-
 - 5.1 Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran sebesar Rp. 26.592.800,-
 - 5.2 Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 29.355.000,-
- 6. Kegiatan Fasilitas Keprotokolan dengan anggaran sebesar Rp. 20.000.000,-
 - 6.1 Subkegiatan Fasilitas dan Koordinasi Pelaksanaan Acara dengan anggaran sebesar Rp. 20.000.000,-
- II Program Penataan Organisasi dengan anggaran sebesar Rp 1.088.570.202,-
 - 1. Kegiatan Fasilitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan dengan anggaran sebesar Rp. 472.825,800,-
 - 2.1 Subkegiatan Fasilitas Penataan Kelembagaan Provinsi dengan anggaran sebesar Rp. 259.211.500,-
 - 2.2 Subkegiatan Fasilitas Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 22.281.000,-

- 2.3 Subkegiatan Penataan Analisis Jabatan dengan anggaran sebesar Rp. 191.333.300,-
- 2. Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas kinerja dengan anggaran sebesar Rp. 615.744.402,-
 - 2.1 Subkegiatan Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan anggaran sebesar Rp. 92.458.504,-
 - 2.2 Subkegiatan Monitoring dan Evaluasi Aknutabilitas Kinerja dengan anggaran sebesar Rp. 223.629.700,-
 - 2.3 Subkegiatan Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja dengan anggaran sebesar Rp. 5.600.000,-
 - 2.4 Subkegiatan Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan dengan anggaran sebesar Rp. 141.583.198,-

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dalam rangka mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Renstra dan Renja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025. Maka setiap tahun setiap pimpinan perangkat daerah sesuai arahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, wajib menandatangani perjanjian kinerja. Perjanjian Kepala Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Adapun rincian sebagai berikut :

Tabel 2.2

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

A. Sasaran Strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam RENSTRA/IKU Perangkat Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	KONDISI AWAL	TARGET			FORMULA INDIKATOR
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya Kualitas Penataan Kelembagaan, Tatalaksana, Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah Yang Memiliki Predikat RB "Istimewa" (Kategori AA/Nilai = 80-90)	Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Predikat RB "Istimewa" (Kategori AA/Nilai = 80-90) adalah Indikator yang mengukur tingkat kualitas hasil pelaksanaan RB oleh Perangkat Daerah yang memiliki Nilai/Indeks 80 – 90.	39,39	45,45	51,51	57,57	$\frac{\text{Jumlah PD Provinsi yang memperoleh Predikat RB "Istimewa"}}{\text{Total Jumlah PD Lingkup Provinsi}} \times 100\%$
		Level Maturitas Kelembagaan	Level Maturitas Kelembagaan adalah Penilaian tingkat kematangan Perangkat Daerah dan Instansi Pemerintah Daerah menggunakan instrumen pengukuran dengan 11 (sebelas) variabel indikator yang meliputi: a. perencanaan; b. monitoring dan pengendalian; c. penjaminan mutu layanan; d. standar operasional prosedur;	40.67	45	47	49	$\text{Kematangan Organisasi Daerah} = \frac{\text{Total Nilai PD Lingkup Provinsi NTT}}{\text{Jumlah PD Lingkup Provinsi NTT}}$

			e. pendidikan dan pelatihan; f. analisis kebijakan dan pemecahan masalah; g. manajemen sumber daya yang terukur; h. manajemen resiko; i. pengukuran kinerja; j. pengembangan inovasi layanan; dan k. budaya organisasi.					
		Indeks Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik adalah Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik oleh Kementerian PAN dan RB.	2,81 (cukup)	2,85 (cukup)	3,1 (baik)	3,2 (baik)	Total Nilai 6 Komponen Standar Pelayanan x 0,75 + Hasil Penilaian Masyarakat melalui F03 x 0,25
		Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan RB Tematik	Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan RB Tematik adalah indikator yang mengukur masalah terkait tata kelola yang berhubungan langsung dengan kinerja perangkat daerah yang diharapkan (kemudahan investasi, kemiskinan, inflasi, penggunaan produk dalam negeri dan digitalisasi administrasi pemerintah).	0	15,15	30,30	45,45	$\frac{\text{PD yang menjalankan RB Tematik}}{\text{Total PD Pengampu RB Tematik}} \times 100\%$

		Presentase Perangkat Daerah dengan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja “memuaskan” A.	Presentase Perangkat Daerah dengan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja “memuaskan” A adalah aktifitas analisis yang sistematis untuk menilai penerapan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) pada PD dilingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Tenggara Timur.	6	12	18	24	$\frac{\text{Jumlah PD yang memperoleh nilai A (memuaskan)}}{\text{Jumlah PD Lingkup Provinsi NTT}} \times 100 \%$
--	--	--	--	---	----	----	----	--

B. Pelaksanaan Anggaran

1)	APBD	Uraian	Alokasi	Keterangan
	a) Belanja (Program)		Rp. 1.600.820.099,-	Realisasi minimal 85%
	1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 537.249897,-	Realisasi minimal 90%
	2	Penataan Organisasi	Rp. 1.063.570.202,-	Realisasi minimal 85%
	b) Pendapatan		Rp. -	-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Semester I merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang pencapaian program, kegiatan dan subkegiatan serta anggaran yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal penting yang diperlukan dalam penyusunan laporan semester I adalah pengukuran realisasi program, kegiatan dan subkegiatan serta anggaran dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai. Pengukuran tersebut dimaksud sebagai hasil suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kerja yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

3.1 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Semester I Tahun 2025

I. Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan

Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan P-DPA Unit Biro Organisasi Tahun Anggaran 2025. Realisasi sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 dengan rincian sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1

No.	Kegiatan	Hasil	Permasalahan	Solusi
A.	Kelembagaan			
1	Melakukan koordinasi dan konsultasi terkait penilaian Tingkat Kematangan PD Provinsi NTT di Biro Organisasi Kemendagri di Jakarta	Biro Organisasi Provinsi NTT melakukan kegiatan Penilaian Tingkat Kematangan PD di lingkungan Provinsi NTT untuk tahun periode 2023-2025	Dalam melakukan Penilaian Tingkat Kematangan Perangkat Daerah terdapat beberapa kendala terkait dengan keterlambatan beberapa perangkat daerah dalam menyampaikan bukti dukung;	Telah disampaikan surat penegasan kepada Kepala Perangkat Daerah yang belum menyampaikan bukti dukung berkaitan dengan penilaian tingkat kematangan perangkat

No.	Kegiatan	Hasil	Permasalahan	Solusi
				daerah;
2	Rapat Penjelasan Instrumen Penilaian Tingkat Kematangan PD Lingkup Pemprov NTT bertempat di ruang rapat Asisten Setda Prov. NTT	PD mendapat penjelasan dan melakukan pengisian instrumen Penilaian Tingkat Kematangan PD Prov NTT serta menyiapkan data dukung pada Variabel sesuai tingkatan masing-masing.	Kebijakan terkait dengan tidak merubah kelembagaan Perangkat Daerah mengakibatkan beberapa kegiatan yang berhubungan dengan penataan kelembagaan PD dan penyusunan uraian tugas Perangkat Daerah mengalami penundaan;	Melakukan konsultasi dengan Sekretaris Daerah sebagai Kepala Perangkat Daerah untuk dapat menggeser anggaran penataan kelembagaan PD agar dapat diserap ketersediaan anggaran tersebut;
3	Membuat SK Tim Penilaian Tingkat Kematangan PD Provinsi NTT	Tim Penilaian Tingkat Kematangan PD bertugas untuk validasi data yang di kirim oleh PD melalui link yang di lampirkan pada surat ke PD.	Perubahan regulasi yang menyebabkan perlu dilakukan penyesuaian penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan dan evaluasi jabatan untuk seluruh Perangkat Daerah yang harus menyesuaikan dengan SOTK terbaru;	Penerapan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana di Lingkungan Instansi

No.	Kegiatan	Hasil	Permasalahan	Solusi
				Pemerintah kepada seluruh perangkat daerah.
4	Melakukan kegiatan Desk Penilaian Tingkat Kematangan tahap 1, 2 dan 3 untuk validasi data dukung dengan PD lingkup Pemprov NTTsesuai jadwal terlampir	Hasil Penilaian Tingkat Kematangan PD Pemprov NTT mendapat nilai rata-rata sementara 30,64 (kategori sedang).untuk tindak lanjutnya akan di lakukan Desk Finalisasi .	Penyesuaian nomenklatur jabatan pelaksana yang barusesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana di Lingkungan Instansi Pemerintah;	Mengupayakan Pendampingan kepada masing-masing Perangkat Daerah sampai pada tingkatan UPTD, Cabang Dinas dan Satuan Pendidikan Formal (SPF) SMA, SMK dan SLB, dalam rangka percepatan pelaksanaan penyelesaian penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
5	Melakukan Pengumpulan Data Penilaian Tingkat Kematangan PD Prov NTT	Penjelasan lanjutan terhadap pengisian instrument Penilaian Tingkat Kematangan PD Provinsi NTT	Keterbatasan Anggaran mengakibatkan beberapa pekerjaan harus dilaksanakan berdasarkan skala prioritas. Tidak semua kegiatan yang dapat dilaksanakan bersamaan;	Mengupayakan Pendampingan secara bertahap bagi masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka Penyusunan evaluasi jabatan;
6	Melakukan Finalisasi Data Penilaian Tingkat Kematangan PD Prov NTT	Tindak lanjut hasil Desk Penilaian Tingkat Kematangan PD ProvinsiNTT	Penambahan formasi CPNS dan PPPK yang mempengaruhi	Memaksimalkan anggaran yang ada untuk melaksanakan

No.	Kegiatan	Hasil	Permasalahan	Solusi
			komposisi bezeting pegawai; Keberhasilan pencapaian target kinerja pada Sub Kegiatan Penataan Analisis Jabatan juga bergantung pada komitmen perangkat daerah, biro-biro dan Rumah Sakit Daerah.	kegiatan berdasarkan skala Prioritas.
7	Asisten kelembagaan PD Kabupaten Kupang	Surat Gubernur NTT Nomor : 0008.5/21 /BO1.2, tanggal 20 Maret 2025, Hal : Rekomendasi Kelembagaan PD Kabupaten Kupang	Lokasi sekolah yang jauh dari jangkauan internet sehingga internet tidak stabil	Melakukan pemetaan penyesuaian analisis jabatan dan analisis beban kerja baik itu dimulai dari informasi jabatan, perhitungan beban kerja dan pemetaan kelas jabatan untuk seluruh Perangkat Daerah;
8	Asistensi Kelembagaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kupang	Surat Gubernur NTT, Nomor: 000.8.5/39/BO1.2, Tanggal 28 Mei 2025, Hal : Rekomendasi Susunan Organisasi PD Kabupaten Kupang	Kurangnya pemahaman dan komitmen operator dalam Anjab ABK	Memberikan ruang konsultasi dengan memanfaatkan media teknologi informasi yang ada
9	Asistensi Kelembagaan UPTD Kepelabuhanan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sabu Raijua, Kelas A	Surat Gubernur NTT Nomor : 0008.5/20/BO1.2, Tanggal 20 Maret 2025, Hal : Rekomendasi kelembagaan UPTD Kepelabuhanan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sabu Raijua		Melakukan pendampingan Anjab dan ABK melalui daring atau media on line

No.	Kegiatan	Hasil	Permasalahan	Solusi
10	Asistensi Kelembagaan UPTD RS Pratama Solor Kabupaten Flores Timur	Asistensi Kelembagaan UPTD RS Pratama Solor Kabupaten Flores Timur		Menyampaikan surat kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk dapat menindaklanjuti menghubungi pihak sekolah untuk menyelesaikan pekerjaan Anjab ABK
11	Asistensi Kelembagaan Penyesuaian Nomenklatur Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Tipe A menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA), Tipe A	Surat Gubernur NTT Nomor : 0008.5/43/BO1.2, tanggal 10 Juni 2025, Hal : Rekomendasi kelembagaan BAPPERIDA Kabupaten Sumba Barat		
12	Asistensi Kelembagaan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao, Kelas A	Surat Gubernur NTT Nomor : 0008.5/49/BO1.2, tanggal 16 Juni 2025, Hal : Rekomendasi kelembagaan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Rote Ndao		
13	Asistensi Kelembagaan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan	Surat Gubernur NTT Nomor : 0008.5/50/BO1.2, tanggal 16 Juni 2025, Hal : Rekomendasi kelembagaan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten		

No.	Kegiatan	Hasil	Permasalahan	Solusi
	Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai Barat	Manggarai Barat		
B.	Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja			
	1. Melakukan Koordinasi Percepatan Hasil Validasi Evaluasi Jabatan Pelaksana pada KemenPAN dan RB	Persetujuan Kelas Jabatan Pelaksana dari Kemen PAN RB kepada Pemerintah Provinsi NTT		
	2. Melakukan Penyusunan Peraturan Gubernur Tentang Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;	Telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2025 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
	3. Melakukan Pendampingan Penyusunan Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Satuan Pendidikan Formal (SPF) SMA, SMK dan SLB Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;	Hasil Penyusunan Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja SPF (SMA, SMK dan SLB) Pada 22 Kabupaten /Kota Lingkup Pemerintah Provinsi NTT dalam Aplikasi SINJAB		
	4. Penerbitan Rekomendasi hasil validasi kelas jabatan dan beban kerja untuk seluruh Perangkat Daerah	Rekomendasi untuk Triwulan I hasil validasi kelas jabatan dan beban kerja perangkat daerah dan Form D pada Aplikasi TPP Pemerintah Provinsi NTT		
	5. Melakukan Pengumpulan Data Pemetaan Kelas Jabatan untuk Seluruh	Peta Jabatan Seluruh Perangkat Daerah, Biro-Biro dan Rumah Sakit Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi		

No.	Kegiatan	Hasil	Permasalahan	Solusi
	Perangkat Daerah, Biro-Biro dan Rumah Sakit Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT	NTT		
	6. Melakukan Penyesuaian Penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan bagi Seluruh Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Konsep Rancangan Keputusan Gubernur Tentang Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah, Biro-Biro dan Rumah Sakit Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT .		
	7. Validasi hasil penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja Satuan Pendidikan Formal (SPF) SMA, SMK dan SLB Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Aplikasi SINJAB.	Hasil validasi penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja Satuan Pendidikan Formal (SPF) SMA, SMK dan SLB Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Aplikasi SINJAB dilakukan pada 509 SPF yang telah melakukan penginputan dalam SINJAB dan 103 belum melakukan penginputan dalam SINJAB.		
	8. Melakukan Koordinasi Percepatan Hasil Validasi Evaluasi Jabatan Pelaksana pada KemenPAN dan RB	Persetujuan Kelas Jabatan Pelaksana dari Kemen PAN RB kepada Pemerintah Provinsi NTT		

II. Bagian Tatalaksana

Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan Renja/DPA 2025

Realisasi sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 dengan rincian sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.2

No.	Kegiatan	Hasil	Permasalahan	Solusi
A.	Tata Laksana Pemerintahan			
	1. Revisi Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 62 Tahun 2023 tentang Tata naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT	Peraturan Gubernur NTT Nomor 12 Tahun 2025 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 62 Tahun 2023 tentang Tata naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT	Masih terdapat 20 Perangkat Daerah/Biro/RSD yang belum melakukan penyesuaian SOP AP berdasarkan Sistem Kerja dan menyampaikan draft Revisi SOP untuk direview;	Biro Organisasi telah menyampaikan Surat Penegasan ke IV hal Evaluasi dan revisi SOP AP kepada Perangkat Daerah sehingga diharapkan seluruh Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT segera menyampaikan Draft SOP AP untuk dapat direview dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur;
	2. Penyusunan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara	Ranpergub tentang Pakaian Dinas ASN di Lingkungan Pemerintah	Hasil Penilaian PEKPPP dari	Melakukan koordinasi terakut

No.	Kegiatan	Hasil	Permasalahan	Solusi
	Timur tentang Pakaian Dinas ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT	Provinsi NTT	KEMENPAN RB dan Penilaian Kepatuhan dari Ombudsman pada 6 OPD sampel Provinsi yaitu Dinas Sosial, DPMPTSP, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kesehatan, UPTD Samsat Kota Kupang, Badan Pendapatan dan Aset Daerah, RSUD Prof. W.Z. Yohannes Kupang terdapat indikator penilaian dengan yang point rendah.	Hasil Penilaian PEKPPP dari KEMENPAN RB dan Penilaian Kepatuhan dari Ombudsman pada 6 OPD sampel Provinsi yaitu Dinas Sosial, DPMPTSP, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kesehatan, UPTD Samsat Kota Kupang, Badan Pendapatan dan Aset Daerah, RSUD Prof. W.Z. Yohannes Kupang terdapat indikator penilaian dengan yang point rendah
	3. Review SOP Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Catatan Perbaikan terhadap rancangan SOP Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Hasil Penilaian Tingkat Kepatuhan Pelayanan Publik Ombudsman RI untuk Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 memperoleh nilai 77,85 point dibandingkan dengan Tahun 2023 dengan nilai 63,92 Pont;	Memberikan ruang konsultasi dengan memanfaatkan media teknologi informasi yang ada.
	4. Review SOP Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Catatan Perbaikan terhadap rancangan SOP Inspektorat Daerah Provinsi NTT		

No.	Kegiatan	Hasil	Permasalahan	Solusi
	1. Review SOP Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Catatan Perbaikan terhadap rancangan SOP Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT		
	2. Review SOP Sekretariat DPRD	Catatan Perbaikan terhadap rancangan Sekretariat DPRD		
	3. Review SOP Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Catatan Perbaikan terhadap rancangan SOP Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	4. Review SOP Satuan Polisi Pamong Praja	Catatan Perbaikan terhadap rancangan SOP Satuan Polisi Pamong Praja		
	5. Review SOP Dinas Pariwisata dan Ekonomi kreatif	Catatan Perbaikan terhadap rancangan SOP Dinas Pariwisata dan Ekonomi kreatif		
	6. Review SOP Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi	Catatan Perbaikan terhadap rancangan SOP Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi		
	7. Review SOP Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Catatan Perbaikan terhadap rancangan SOP Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
	8. Review SOP Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Catatan Perbaikan terhadap rancangan SOP Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
	9. Review SOP Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Catatan Perbaikan terhadap rancangan SOP Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT		
	10. Review SOP Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah	Catatan Perbaikan terhadap rancangan SOP Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah		

No.	Kegiatan	Hasil	Permasalahan	Solusi
	11.Finalisasi Ranpergub SOP Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Kepgub SOP-AP Nomor 34/KEP/HK/2025		
	12.Finalisasi Ranpergub SOP Satuan Polisi Pamong Praja	Kepgub SOP-AP Nomor 110/KEP/HK/2025		
	13.Finalisasi Ranpergub SOP Inspektorat Daerah	Kepgub SOP-AP Nomor 217/KEP/HK/2025		
	14.Finalisasi Ranpergub SOP Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Kepgub SOP-AP Nomor 219/KEP/HK/2025		
	15.Finalisasi Ranpergub SOP Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Penyampaian Ranpergub ke Biro Hukum	Proses Tanda Tangan	
	16.Finalisasi Ranpergub SOP Sekretariat DPRD	Penyampaian Ranpergub ke Biro Hukum	Proses Tanda Tangan	
B	Pelayanan Publik			
	1. Penyusunan SK Tim KOIN-YANLIK;	Tersedianya SK Tim KOIN-YANLIK		
	2. Evaluasi hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggara Pelayanan Publik Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Ombudsman RI;	Terlaksananya Evaluasi Pelayanan Publik Melalui Metode Observasi Lapangan Di Perangkat daerah (Dinas Sosial, RSUD Prof. W.Z.Yohanes Kupang, UPTD Samsat Kota Kupang di Kupang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, DPMPTSP)		
	3. Evaluasi hasil Penilaian Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) Tahun 2024	Terlaksananya Evaluasi PEKPPP Melalui Metode Observasi Lapangan pada PD (DPMPTSP, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Badan Pendapatan dan Aset Daerah, dan		

No.	Kegiatan	Hasil	Permasalahan	Solusi
	yang dikeluarkan oleh KEMENPAN RB;	RSUD Prof. W.Z.Yohanes)		
	4. Pembentukan Tim Evaluator Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik Mandiri Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2025	Keputusan Gubernur NTT Nomor: 138/KEP/HK/2025 tentang Tim Evaluator Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik Mandiri Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2025		
	5. Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik Mandiri Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2025	Keputusan Gubernur NTT Nomor: 158/KEP/HK/2025 tentang Tim Koordinasi Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik Mandiri Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2025		
	6. Pembentukan Tim Pemantauan dan Evaluasi Pelaksana Survey Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2025	Keputusan Gubernur NTT Nomor: 171/KEP/HK/2025 tentang Tim Pemantauan dan Evaluasi Pelaksana Survey Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2025		
	7. Merevisi Quisioner Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik Mandiri Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2025	Usulan Quisioner Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik Mandiri Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2025 ke KEMENPAN RB		
	8. Pendampingan dan Persiapan Top 10 KOIN	11 inovasi dari Pemerintah Provinsi NTT dinyatakan lolos seleksi		

No.	Kegiatan	Hasil	Permasalahan	Solusi
	YANLIK Tahun 2024 dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tingkat Nasional Tahun 2025;	administrasi dan 2 inovasi dinyatakan tidak lolos seleksi administrasi berdasarkan Surat Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Nomor: B/174/PP.00.05/2025 tanggal 23 Juni 2025 perihal Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi KIPP Tahun 2025.		

III. Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja

Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan Renja/DPA 2024

Realisasi sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 dengan rincian sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.3

No.	Kegiatan	Hasil	Permasalahan	Solusi
A.	Reformasi Birokrasi			
	1. Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Ende	Terlaksananya Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Kabupaten Ende	Belum tersusunnya Roadmap Nasional sehingga belum ada penyesuaian RB Tematik dengan Roadmap RB Nasional	Melakukan koordinasi dengan Kementerian PAN dan RB mengenai penyesuaian RB tematik yang harus sesuai dengan RoadMap RB Nasional
	2. Rapat Penyampaian Hasil Evaluasi RB Tahun 2024 dan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi RB Pemerintah Provinsi Tahun 2024.	Terlaksananya Rapat Penyampaian Hasil Evaluasi RB Tahun 2024 dan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi RB Pemerintah Provinsi Tahun 2024	Belum dilaksanakan kegiatan budaya kerja	Pelaksanaan Budaya Kerja akan dilaksanakan pada semester II
	3. Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Kabupaten Lembata	Terlaksananya Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Kabupaten Lembata	Nilai SAKIP Pemerintah Provinsi NTT belum mencapai target RPJMD. Hal ini disebabkan karena terdapat	Melakukan koordinasi mengenai penyusunan RoadMap dengan

No.	Kegiatan	Hasil	Permasalahan	Solusi
			catatan yang harus diperbaiki dalam penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan selanjutnya (RPJMD, IKU, LKIP)	Kementerian PAN dan RB
	4. Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Kabupaten Ngada	Terlaksananya Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Kabupaten Ngada	Masih banyak PD yang belum membuat cascading sasaran kinerja	Melakukan reuiu berbagai dokumen perencanaan agar terjadi keselarasan
	5. Lembur Penyusunan Rencana Aksi RB Tematik Dan General	Terlaksananya Penyusunan Rencana Aksi RB Tematik dan General	Dalam pengisian dan persiapan data-data dukung untuk LKE masih banyak PD yang belum memahami disebabkan karena dalam pengisian data dalam LKE orang yang bersangkutan sudah pindah atau diganti dengan pegawai lain yag belum memahami tentang pengisian LKE/data-data yang dibutuhkan dalam penilaian kinerja kepala PD	Melakukan desk penyusunan cascading
B	Akuntabilitas Kinerja			
	1. Menyusun LKIP Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2024.	Tersusunnya dokumen LKIP Pemprov NTT Tahun 2024		
	2. Menyusun PK Gubernur NTT Tahun 2025	Tersusunnya dokumen PK Gubernur 2025		
	3. Memfasilitasi penyusunan LKIP, Tahun 2024, PK dan Rencana Aksi PD lingkup Pemprov.NTT Tahun 2025	Tersusunnya dokumen LKIP, PK dan Rencana Aksi PD.		
	4. Melakukan Fasilitasi Dan Pembinaan SAKIP di Kabupaten Sikka dan Sumba Tengah	Terlaksananya faslitasi dan pembinaan sakip di Kabupaten, Sikka dan Sumba Tengah		
	5. Melakukan konsultasi penyusunan LAKIP di	Terlakasanya Kegitan Konsultasi		

No.	Kegiatan	Hasil	Permasalahan	Solusi
	Kementerian PAN dan RB di Kementerian PANRB di Jakarta			
	6. Memfasilitasi penyusunan Cascading PD	Tersusunnya Cascading PD		
	7. Melakukan Penilaian Kinerja Kepala PD Lingkup Pemerintah Provinsi NTT	Terlaksananya kegiatan Penilaian Kinerja PD Tahun 2024 LKE https://bit.ly/BUKTIDUKUNG_AKIP		
C.	Budaya Kerja			

3.4. Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran tahun 2025 dan realisasi sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 dengan rincian sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini

Tabel 3.4

No.	Program/Kegiatan/sub kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	537.249.897,00	237.287.290,00	44,16
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	214.769.697,00	89.906.700,00	41,86
1.1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	18.343.000,00	6.944.950,00	37,86
1.2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	27.315.700,00	-	-
1.3.	Koordinasi dan Penyesuain Laporan Pencapaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	169.110.997,00	76.961.750,00	45,50
2.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	203.037.800,00	92.876.990,00	45,74
2.1.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35.835.300,00	20.235.250,00	56,46
2.2.	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan	2.400.000,00	1.200.000,00	50
2.3.	Penyediaan Bahan/Material	40.451.500,00	20.248.300,00	50,05
2.4.	Fasilitas Kunjungan Kerja	25.900.000,00	13.000.000,00	50,19
2.5.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	98.451.000,00	38.193.440,00	38,79
3.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah daerah	34.200,00	-	-
3.1.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-
3.2.	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	34.200,00	-	-
4.	Penyediaan Jasa Penunjang urusan	63.460.400,00	28.330.000,00	44,64

No.	Program/Kegiatan/sub kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
	Pemerintahan Daerah			
4.1.	Penyediaan Jasa surat Menyurat	4.000.400,00	2.000.000,00	49,99
4.2.	Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber Daya Air dan Listrik	3.780.000,00	1.890.000,00	50
4.3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	55.680.000,00	22.440.000,00	40,30
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	55.947.800,00	32.173.600,00	57,50
5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	26.592.800,00	15.543.000,00	58,44
5.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.355.000,00	16.630.600,00	56,65
II	Program Penataan Organisasi	1.063.570.202,00	365.306.191,00	34,34
1.	Fasilitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan	472.825.800,00	151.321.560,00	32,00
1.1.	Fasilitas Penataan Kelembagaan Provinsi	259.211.500,00	55.022.860,00	21,22
1.2.	Fasilitas Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	22.281.000,00	1.161.000	0,27
1.3	Penataan Analisis Jabatan	191.333.300,00	95.137.700,00	49,72
2.	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	590.744.402,00	213.984.631,00	36,22
2.1.	Fasilitasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	92.458.504,00	37.574.266,00	40,63
2.2.	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	198.629.700,00	93.738.865,00	47,19
2.3.	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	5.600.000,00	-	-
2.4.	Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	141.583.198,00	51.588.500,00	36,43
2.5.	Fasilitas Peningkatan Pelayanan Publik	152.473.000,00	31.083.000,00	20,38

3.5. Capaian Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	KONDISI AWAL	TARGET	REALISASI	FORMULA INDIKATOR
				2024	2025	2025	
1	2	3	4	5	6	7	9
1.	Meningkatnya Kualitas Penataan Kelembagaan, Tatalaksana, Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah Yang Memiliki Predikat RB "Istimewa" (Kategori AA/Nilai = 80-90)	Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Predikat RB "Istimewa" (Kategori AA/Nilai = 80-90) adalah Indikator yang mengukur tingkat kualitas hasil pelaksanaan RB oleh Perangkat Daerah yang memiliki Nilai/Indeks 80 – 90.	45,45	51,51	NA	$\frac{\text{Jumlah PD Provinsi yang memperoleh Predikat RB "Istimewa"}}{\text{Total Jumlah PD Lingkup Provinsi NTT}} \times 100\%$
		Level Maturitas Kelembagaan	Level Maturitas Kelembagaan adalah Penilaian tingkat kematangan Perangkat Daerah dan Instansi Pemerintah Daerah menggunakan instrumen pengukuran dengan 11 (sebelas) variabel indikator yang meliputi: a. perencanaan; b. monitoring dan pengendalian; c. penjaminan mutu layanan; d. standar operasional prosedur; e. pendidikan dan	45	47	30,64	$\text{Kematangan Organisasi Daerah} = \frac{\text{Total Nilai PD Lingkup Provinsi NTT}}{\text{Jumlah PD Lingkup Provinsi NTT}}$

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	KONDISI AWAL	TARGET	REALISASI	FORMULA INDIKATOR
				2024	2025	2025	
1	2	3	4	5	6	7	9
			pelatihan; f. analisis kebijakan dan pemecahan masalah; g. manajemen sumber daya yang terukur; h. manajemen resiko; i. pengukuran kinerja; j. pengembangan inovasi layanan; dan k. budaya organisasi.				
		Indeks Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik adalah Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik oleh Kementerian PAN dan RB.	2,85 (cukup)	3,1 (Baik)		Total Nilai 6 Komponen Standar Pelayanan x 0,75 + Hasil Penilaian Masyarakat melalui F03 x 0,25
		Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan RB Tematik	Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan RB Tematik adalah indikator yang mengukur masalah terkait tata kelola yang berhubungan langsung dengan kinerja perangkat daerah yang	15,15	30,30	100	$\frac{\text{PD yang menjalankan RB Tematik}}{\text{Total PD Pengampu RB Tematik}} \times 100\%$

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	KONDISI AWAL	TARGET	REALISASI	FORMULA INDIKATOR
				2024	2025	2025	
1	2	3	4	5	6	7	9
			diharapkan (kemudahan investasi, kemiskinan, inflasi, penggunaan produk dalam negeri dan digitalisasi administrasi pemerintah).				
		Presentase Perangkat Daerah dengan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja "memuaskan" A.	Presentase Perangkat Daerah dengan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja "memuaskan" A adalah aktifitas analisis yang sistematis untuk menilai penerapan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) pada PD dilingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.	12	18,00	51.28	$\frac{\text{Jumlah PD yang memperoleh nilai A (memuaskan)}}{\text{Jumlah PD Lingkup Provinsi NTT}} \times 100\%$

PENUTUP

Laporan Semester I merupakan Pertanggungjawaban pelaksanaan Program, Kegiatan dan subkegiatan serta anggaran Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur selama Januari sampai dengan Juni 2025. yang menggambarkan keberhasilan atau kegagalan suatu instansi pemerintah atau pelaksanaan sasaran suatu organisasi yang ditetapkan sebelumnya. Laporan Semester I diharapkan menjadi bahan masukan bagi peningkatan akuntabilitas pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan pada masa yang akan datang.

Untuk meningkatkan capaian kinerja berikutnya maka beberapa rekomendasi atau langkah-langkah yang diperlukan adalah :

- a. Peningkatan pemahaman pengetahuan dan ketrampilan terhadap tugas dan fungsi antara lain dilakukan dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan;
- b. Memaksimalkan anggaran yang ada untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan skala Prioritas;
- c. Memberikan ruang konsultasi dengan memanfaatkan media teknologi informasi yang ada;
- d. Perlu dilakukan evaluasi dan penilaian terhadap pelaksanaan pelayanan publik dalam rangka perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT;
- e. Melakukan koordinasi mengenai penyusunan *roadmap* dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- f. Melakukan reviu berbagai dokumen perencanaan agar terjadi keselarasan;
- g. Melakukan desk penyusunan Cascading Kinerja.

Kupang, Juli 2025

Kepala Biro Organisasi
Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur



Djoese S.M. Nai Buti, S.Pt, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 197103291999031002